



In cooperation with:



Training & Sertifikasi Pelaksana **Tata Kelola**



Certified
Governance
Oversight
Professional



Certified
Chief
Governance
Officer



Certified
Governance
Professional



Sertifikasi Pelaksana Tata Kelola



Sebagai bentuk nyata pelaksanaan penugasan **Keputusan Menko Perekonomian No. 117 tahun 2016** mengenai sertifikasi pelaksana tata kelola dan juga sebagai upaya mengakselerasi penerapan *good governance* melalui agen pengubah (*agent of change*) di sektor publik dan korporasi, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengembangkan sertifikasi kompetensi pelaksana tata kelola (*governance*). Dalam pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasi, KNKG bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS) yang saat ini telah memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan nomor **BNSP-628-IDN** dan telah memperoleh lisensi untuk skema sertifikasi tata kelola dari BNSP berdasarkan surat keputusan **Nomor KEP.0609/BNSP/VI/2018**. Sedangkan untuk pelatihan persiapan sertifikasi tata kelola, KNKG bekerja sama dengan Center for Risk Management and Sustainability (CRMS Indonesia).



Manfaat Sertifikasi



Sertifikasi pelaksana tata kelola dapat memberikan manfaat baik kepada pemegang sertifikasi maupun kepada organisasi pengguna, antara lain:

Manfaat bagi pemegang sertifikasi:

- ▶ Pengakuan kompetensi bidang tata kelola secara nasional
- ▶ Bernilai tambah sebagai sumber daya insani (SDI) unggulan
- ▶ Membuka peluang lebih luas dalam pengembangan karir profesional
- ▶ Peluang membangun kompetensi terintegrasi bidang tata kelola dengan bidang manajemen risiko dan kepatuhan
- ▶ Terdukung oleh LSP yang berkomitmen dalam perawatan kompetensi tata kelola
- ▶ Terdukung oleh komunitas profesional bidang tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan

Manfaat bagi pemegang sertifikasi:

- ▶ Memiliki sumber daya insani (SDI) yang kompeten dalam bidang tata kelola
- ▶ Memudahkan organisasi membangun budaya tata kelola yang sehat
- ▶ Meningkatkan probabilitas kesuksesan dalam mencapai visi, misi dan tujuan strategik organisasi
- ▶ Meningkatkan kematangan organisasi dalam praktik tata kelola yang efektif
- ▶ Mendukung capaian nasional dalam peningkatan praktik tata kelola yang baik secara keseluruhan di Indonesia
- ▶ Mempermudah organisasi melakukan transformasi dalam era revolusi industri 4.0



Skema Sertifikasi Pelaksana **Tata Kelola**



Skema sertifikasi pelaksana tata kelola dibangun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus pelaksana tata kelola. SKK khusus tersebut dibangun dengan rujukan dasar pedoman umum *Good Corporate Governance (GCG)* serta *Good Public Governance (GPG)* yang dikeluarkan oleh KNKG. Berdasarkan rujukan SKK Khusus tersebut, telah dikembangkan 28 unit kompetensi bagi pelaksana tata kelola yang terdiri dari tiga skema, yaitu:



Certified
Governance
Oversight
Professional

Certified Governance
Oversight Professional (**CGOP**)

Korporasi	Sektor Publik
<p>Pengawas Tata Kelola di Sektor Publik pada tingkat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dewan Komisaris (atau setingkat)• Anggota Komite Dewan Komisaris (atau setingkat)	<p>Pengawas Tata Kelola di Sektor Publik pada tingkat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pejabat Eselon 1a (atau setingkat)• Pejabat Eselon 1b (atau setingkat)



Certified
Chief
Governance
Officer

Certified Chief
Governance Officer (**CCGO**)

Korporasi	Sektor Publik
<p>Pimpinan Tata Kelola di Sektor Publik pada tingkat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Direksi (atau setingkat)• Kepala Divisi/<i>General Manager</i> (atau setingkat)• Sekretaris Perusahaan (atau setingkat)• Kepala Audit Internal (atau setingkat)	<p>Pimpinan Tata Kelola di Sektor Publik pada tingkat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pejabat Eselon 2 (atau setingkat)• Pejabat Eselon 3 (atau setingkat)



Certified
Governance
Professional

Certified Governance
Professional (**CGP**)

Korporasi	Sektor Publik
<p>Pelaksana Tata Kelola di Sektor Publik pada tingkat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kepala Departemen atau Manajer (atau setingkat)• Penyelia (atau setingkat)	<p>Pelaksana Tata Kelola di Sektor Publik pada tingkat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pejabat Eselon 4 (atau setingkat)• Staf Senior pada organisasi publik

Tentang CRMS



CRMS (Center for Risk Management & Sustainability, sebelumnya Center for Risk Management Studies) adalah organisasi pendidikan yang memiliki visi memfasilitasi akselerasi praktik tata kelola (Governance), manajemen risiko (Risk Management), kepatuhan (Compliance), dan Keberlanjutan (Sustainability) di Indonesia melalui pengembangan keilmuan dan inisiatif untuk berbagi ke masyarakat luas.

Sejak tahun 2010, CRMS telah berkolaborasi dengan berbagai organisasi dalam menyelenggarakan program edukasi bagi para profesional baik manajemen risiko ataupun secara umum di bidang GRCS (Governance, Risk Management, Compliance, and Sustainability), dan menyediakan kesempatan untuk memperluas kapasitas serta mempertajam kapabilitas profesional mereka.

Tentang KNKG



Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dibentuk oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1999 melalui **Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999**. Menyadari bahwa implementasi *good corporate governance* membutuhkan situasi yang kondusif dari kondisi *governance* di sektor publik, Pemerintah memperluas cakupan kerja KNKG dengan memasukkan isu *public governance*, yang tertuang dalam **Keputusan Menko Bidang Perekonomian RI No: KEP-49/M.EKON/11/TAHUN 2004** tentang Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan terakhir diperbaharui dengan **Keputusan Menko Bidang Perekonomian RI No. 117 Tahun 2016**. Dalam perjalanannya, KNKG telah menghasilkan 11 pedoman dan manual governance, yang mencakup kategori pedoman umum, pedoman sektoral dan manual governance. Selain itu, berbagai inisiatif dijalankan oleh KNKG bekerjasama dengan berbagai regulator, diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan Kementerian BUMN.

Tentang LSP MKS



Pada awal pendiriannya, LSP MKS memulai program sertifikasi pada bidang manajemen risiko yang saat ini telah memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan nomor **BNSP-628-IDN** serta telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17024 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). SNI ISO/IEC 17024 merupakan rujukan standar internasional bagi Lembaga Sertifikasi Person. Saat ini KAN telah memiliki perjanjian *Multilateral Recognition Agreement (MRA)* dengan *Pacific Accreditation Cooperation (PAC)* mengenai standar Lembaga Sertifikasi Person ISO/IEC 17024 sehingga kompetensi Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi KAN dapat diakui keberterimaannya secara global.

Dengan dimilikinya 2 pengakuan dari BNSP dan KAN menjadikan keberterimaan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP MKS pada bidang manajemen risiko dapat diakui baik secara nasional maupun internasional.



Setelah memiliki lisensi dan akreditasi untuk sertifikasi manajemen risiko, saat ini LSP MKS telah memiliki lisensi BNSP untuk skema sertifikasi tata kelola sesuai dengan **Surat Keputusan Nomor KEP.0609/BNSP/VI/2018**. Kedepannya LSP MKS segera melengkapi program sertifikasi untuk bidang kepatuhan.



▲ CONTACT US

CRMS

Batununggal Asri No.18

Bandung 40267

Phone. (+6222) 8730-1035

Mobile. (+62) 811 22 333 075

Email. secretariat@crmsindonesia.org

Website. www.crmsindonesia.org



Training & Sertifikasi Pelaksana

Tata Kelola

